

Makalah Diskusi No. 11

Dampak Covid-19 terhadap Ketahanan dan Perdagangan Pangan di Indonesia

oleh Arianto Patunru & Felippa Amanta



Makalah Diskusi No. 11
**Dampak Covid-19 terhadap Ketahanan dan
Perdagangan Pangan di Indonesia**

Penulis:

Arianto Patunru & Felippa Amanta

“Dampak Covid-19 Terhadap Ketahanan dan Perdagangan Pangan di Indonesia,” oleh Arianto Patunru dan Felippa Amanta pertama dipublikasikan dalam *Economic Dimensions of Covid-19 in Indonesia: Responding to the Crisis*, yang disunting oleh Blane Lewis dan Firman Witoelar, 2021. Artikel ini diterbitkan kembali di sini dengan izin dari penerbit, ISEAS - Yusof Ishak Institute, <http://bookshop.iseas.edu.sg>

Jakarta, Indonesia

Juni, 2021

DAFTAR ISI

Abstrak.....	6
Pendahuluan.....	7
Perkembangan Terakhir Perdagangan Pangan Dunia selama Pandemi Covid-19.....	8
Ketahanan Pangan Indonesia di Tengah Covid-19.....	12
Implikasi Jangka Panjang.....	25
Langkah ke Depan: Membangun Sistem Pangan yang Kuat.....	26
Referensi.....	28

Daftar Tabel

Tabel 1. Negara andalan impor Indonesia, 2018.....	19
Tabel 2. Hambatan non-tarif Indonesia untuk produk pangan-pertanian....	20
Tabel 3. Regulasi impor pangan: bawang putih dan bawang bombai.....	23

Daftar Gambar

Gambar 1. Indeks Harga Pangan FAO, Januari 1990 hingga September 2020 (2014–2016 = 100).....	12
Gambar 2. Harga komoditas beras, Thailand dan Vietnam, Januari 2019 sampai September 2020 (US\$/ton).....	13
Gambar 3. Produksi beras di Indonesia dan di dunia, 1961-2019 (digiling, juta ton).....	13
Gambar 4. Wilayah produsen beras dan Covid-19.....	15
Gambar 5. Harga pangan menjelang dan pada masa penyebaran pandemi, Januari 2018 hingga Agustus 2020 (Januari 2018 = 100).....	16
Gambar 6. Pengeluaran konsumsi, Maret 2018 hingga Juni 2020 (Maret 2018 = 100).....	18
Gambar 7. Nilai tukar petani, Januari 2019 sampai September 2020 (2018 = 100).....	18
Gambar 8. Harga beras domestik dan dunia, 1995 hingga Maret 2020 (rupiah/kg).....	21
Gambar 9. Harga daging sapi domestik dan dunia, 2011-2019 (rupiah/kg).....	21

ABSTRAK

Ketahanan pangan adalah isu yang selalu menjadi perdebatan di Indonesia. Ketika Indonesia telah masuk dalam kelompok berpenghasilan menengah ke atas, negara ini masih harus berkuat untuk memastikan akses pangan untuk masyarakatnya. Ambisi swasembada memperkeruh situasi ini, karena kebijakan yang ada kerap kali bersifat proteksionis sehingga mengakibatkan tingginya harga domestik yang akhirnya menyakiti masyarakat prasejahtera yang sulit untuk mengakses pangan dengan harga terjangkau. Saat ini, pandemi Covid-19 berpotensi semakin memperburuk kerawanan pangan Indonesia dan berakibat pada bertambahnya kelaparan kronis serta tantangan pengembangan yang berkepanjangan. Dalam makalah ini, kami membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan Indonesia dengan menelaah perdagangan pangan dunia dan regional, serta kebijakan pangan domestik Indonesia. Kami berargumen bahwa pandemi Covid-19 memaparkan kerentanan sistem pangan Indonesia, terutama dalam hal turunnya tren produksi, kapasitas distribusi yang kurang memadai, serta pembatasan perdagangan. Reformasi yang dibutuhkan termasuk dengan menggiatkan lebih banyak penanaman modal, mendukung diversifikasi pasok pangan, melonggarkan aliran perdagangan pangan, dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memastikan ketahanan pangan regional.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 secara langsung berdampak pada pasok dan permintaan pangan dunia, sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya krisis pangan selain krisis kesehatan yang sudah ada. Pembatasan mobilitas yang diperlukan untuk mencegah penyebaran virus mengganggu rantai pasok pangan yang semakin rumit dan saling berhubungan satu sama lain, mulai dari produksi pangan hingga pengolahan, distribusi dan konsumsi, baik secara domestik maupun secara global. Disrupsi tersebut bisa berakibat kelangkaan pangan, kenaikan atau ketidakstabilan harga yang mengancam kesejahteraan orang-orang yang bekerja di rantai pasok dan mengancam ketahanan pangan, terutama bagi kaum prasejahtera yang sangat rentan. Sebuah laporan yang dibuat oleh *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO), *International Fund for Agriculture Development* (IFAD), *United Nations International Children's Fund* (UNICEF), *World Food Programme* (WFP) dan *World Health Organization* (WHO) memperkirakan bahwa pada tahun 2019, 690 juta orang atau 9% dari populasi dunia mengalami kelaparan, dan pandemi Covid-19 akan menambah sekitar 83 juta hingga 132 juta orang lagi yang mengalami kelaparan kronis (FAO et al., 2020).

Risiko kerawanan pangan selama dan setelah pandemi akan berdampak parah di Indonesia di mana bahkan sebelum pandemi 9% dari populasi atau 22 juta orang mengalami kekurangan gizi selama tahun 2017 hingga 2019.¹ *Global Food Security Index* yang dibuat oleh *The Economist Intelligence Unit* menempatkan Indonesia di posisi ke-62 dari 113 negara perihal ketahanan pangan pada tahun 2019, posisi tersebut di bawah Singapura (posisi ke-1), Malaysia (ke-28), Thailand (ke-52), dan Vietnam (ke-54).² Rendahnya peringkat Indonesia paling besar dipengaruhi karena minimnya keterjangkauan dan rendahnya kualitas serta keamanan pangan, khususnya karena kurangnya keragaman pola makan yang dikonsumsi. Lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak bisa membeli pangan yang bergizi, dan proporsi tersebut jauh lebih besar di provinsi-provinsi miskin seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua (WFP, 2017). Rendahnya kualitas pola makan mengakibatkan prevalensi kekerdilan tinggi yang berdampak terhadap 31% anak-anak di bawah usia lima tahun, yang secara signifikan lebih tinggi daripada prevalensi kekerdilan dunia sebesar 21% (Global Hunger Index, 2020; FAO et al., 2020). Kasus kekerdilan ini juga terkonsentrasi di provinsi-provinsi miskin, seperti NTT (40,3%), Sulawesi Barat (40%), dan Kalimantan Tengah (39%) (Databoks, 2017).

Pandemi Covid-19 bisa semakin memperburuk kerawanan pangan Indonesia dan berakibat pada bertambahnya kelaparan kronis serta tantangan pengembangan yang berkepanjangan. Bab ini akan membahas dampak Covid-19 terhadap ketahanan pangan di Indonesia dengan melihat perdagangan pangan dunia dan regional serta kebijakan pangan domestik Indonesia. Selain itu, bab ini juga akan menelaah potensi implikasi jangka panjang dan reformasi yang dibutuhkan untuk sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan.

¹ Global Hunger Index 2020, www.globalhungerindex.org/indonesia.html

² Global Food Security Index 2020, <https://foodsecurityindex.eiu.com/Index>

PERKEMBANGAN TERAKHIR PERDAGANGAN PANGAN DUNIA SELAMA PANDEMI COVID-19

Perdagangan pangan dan pertanian adalah komponen penting dari sebuah sistem yang mendukung ketahanan pangan. Perdagangan pertanian dunia meningkat lebih dari tiga kali lipat dari senilai US\$ 570 miliar pada tahun 2000 menjadi US\$ 1.6 triliun pada tahun 2016 (FAO, 2018a). Perdagangan pangan di wilayah Asia bertumbuh dari US\$ 22 miliar pada tahun 2000 menjadi lebih dari US\$ 70 miliar pada tahun 2018 (Oxford Economics, 2020). Ketergantungan negara-negara terhadap impor pangan dari pasar internasional meningkat hingga rata-rata 28% secara global selama tahun 2015-2017 (Schmidhuber, 2020). Layaknya negara lain, Indonesia diuntungkan oleh sistem pangan global, baik dalam hal impor maupun ekspor produk pertanian. Pada 2018, impor produk hewan, sayuran, dan pangan Indonesia mencapai US\$ 20 miliar atau 11% dari total impor. Ekspor bahkan mencapai nilai yang lebih besar, yaitu US\$ 38 miliar yang mayoritas datang dari minyak sawit, dan berkontribusi sebesar 21% dari total ekspor Indonesia (WITS, 2020). Dengan mempertimbangkan signifikansi perdagangan pangan global, gangguan perdagangan pangan selama pandemi Covid-19 menjadi pertanda potensi masalah kerawanan pangan.

The World Trade Organization memprediksi perdagangan barang global (*global merchandise trade*) akan jatuh sebesar 13% hingga 32% pada tahun 2020 (WTO, 2020), atau lebih parah daripada penurunan saat krisis ekonomi dunia tahun 2008-2009. Bukti penurunan tersebut terlihat pada April 2020 ketika pengiriman kontainer jatuh hingga 5,9% *year-on-year* (yoy) dan permintaan ekspor berkurang tajam (Bank Dunia, 2020a). Analisis awal data perdagangan menunjukkan bahwa perdagangan pangan dan pertanian lebih kuat dibandingkan perdagangan sektor-sektor lain. Selama kuartal pertama 2020, sementara sektor seperti tekstil dan pakaian, otomotif, peralatan mesin dan komunikasi mencatat penurunan perdagangan, sektor pangan dan pertanian bertumbuh sebesar 2% jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun sebelumnya (UNCTAD, 2020a). Pertumbuhan yang positif tersebut harus dipandang dalam konteks perdagangan pertanian yang rendah. Pada 2018, ekspor material mentah pertanian dicatat kurang dari 2% dari total ekspor barang (Bank Dunia, 2020b).

Kuatnya perdagangan pangan dan pertanian bisa dihubungkan dengan beberapa faktor. Pertama, rantai pasok pangan dan pertanian tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan manufaktur. Ada integrasi rantai nilai global yang terbatas, di mana produksi dan pengolahan dibagi ke beberapa negara, yang membuat rantai menjadi tidak terlalu rentan terhadap gangguan. Kedua, sebagai kebutuhan utama, permintaan pangan relatif tidak dipengaruhi oleh pendapatan sehingga perdagangan tetap mengalir, terutama dengan dukungan para pemimpin dunia yang sudah berjanji untuk memastikan aliran barang-barang pokok, termasuk komoditas pertanian.³ Meskipun demikian, perdagangan pangan dan pertanian tetap sangat rentan terhadap risiko dan gangguan mobilitas yang disebabkan oleh Covid-19.

³ Pernyataan pimpinan G20. 'Pernyataan luar biasa pemimpin KTT G20 tentang Covid-19'. [26 Maret 2020]. <https://reliefweb.int/report/world/g20-leaders-statement-extraordinary-g20-leaders-summit-statement-covid-19>

Pandemi Covid-19 terjadi ketika produksi tahunan sangat besar, di mana pasok sereal global mendekati jumlah tertinggi karena kondisi cuaca yang mendukung. FAO (2020a) memperkirakan bahwa produksi sereal dunia pada tahun 2020 akan mencapai sekitar 2,8 miliar ton, melewati angka produksi tahun 2019 sebesar 3%. Di antara itu, produksi beras di dunia diramalkan akan melebihi 500 juta ton pada 2020, meningkat hampir 2% dari tahun sebelumnya. Pasok beras lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan dunia dengan rasio stok-ke-penggunaan sebesar 35%. Akan tetapi, perkiraan produksi bervariasi ketika dipecah menjadi beberapa komoditas pertanian. Buah dan sayuran membutuhkan sumber daya manusia yang intensif saat masa panen, dan banyak negara seperti Amerika Serikat dan Australia bergantung pada pekerja migran musiman. Pembatasan mobilitas akibat Covid-19 juga membuat negara-negara tersebut berisiko kekurangan tenaga kerja, yang akhirnya bisa menyebabkan panen yang kurang optimal (Schmidhuber et al., 2020).

Industri pengolahan makanan juga terdampak parah oleh pandemi ini. Misalnya, rumah potong hewan secara khusus rentan terhadap penularan Covid-19 karena temperatur yang dingin, ruang sempit pada jalur produksi, dan udara yang kering. Skenario risiko tinggi ini telah berdampak pada banyaknya penyebaran penularan virus di Australia, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Britania Raya, hingga banyak rumah potong hewan harus menghentikan operasinya. Di Australia, sebagai negara ketujuh terbesar produsen daging dalam hal nilai dan sumber impor daging utama Indonesia, produksi daging sapi nasional dan sapi potong dewasa bisa turun hingga 16% dan 19%, dari tahun 2019 (MLA, 2020).

Distribusi pasok pangan di pasar global juga menghadapi tantangan pembatasan mobilitas, terutama saat pandemi baru saja mulai menyebar. Misalnya, India memberlakukan karantina selama tiga minggu pada bulan Maret yang menghentikan operasional pelabuhan dan menyebabkan keterlambatan ekspor pangan yang sudah dijadwalkan (Bloomberg, 2020). Sementara hampir semua negara secara umum telah mengecualikan distribusi pangan dan pertanian dari pembatasan mobilitas, logistik tetap terganggu karena adanya penutupan jalan, blokade, perlambatan operasional dan pengurangan kapasitas transportasi. Komoditas bernilai tinggi seperti buah-buahan, sayuran, dan perikanan lebih sensitif terhadap penyempitan alur logistik karena rentan membusuk dan dapat menjadi sampah makanan dalam rantai pasok.

Gangguan yang lain adalah hambatan-hambatan perdagangan yang diadopsi oleh beberapa negara untuk menanggapi pandemi. Dari Januari sampai Oktober 2020, *International Trade Centre* mencatat lebih dari 300 kebijakan perdagangan sementara yang diberlakukan oleh 140 negara terkait pandemi Covid-19 (ITC, 2020). Termasuk di dalamnya 148 kebijakan ekspor yang 96% dari kebijakan tersebut merupakan upaya pembatasan, dan 185 kebijakan impor di mana 80% dari kebijakan tersebut merupakan upaya pembebasan. Statistik tersebut menggambarkan naluri banyak negara untuk menimbun pasok dengan melindungi pasok yang didapat dari sumber domestik sembari juga membuka akses pasok asing. Kebijakan-kebijakan perdagangan tersebut kebanyakan berdampak pada alat pelindung diri seperti masker serta produk medis dan farmasi, namun selain itu juga berdampak terhadap produk pangan dan pertanian.

Khusus untuk produk pangan dan pertanian, 28 negara memberlakukan kebijakan pembatasan ekspor, seperti kuota ekspor terbatas atau bahkan pelarangan ekspor total. Kebijakan tersebut mengantisipasi kurangnya pasok pangan domestik saat pandemi berkepanjangan tanpa akhir yang jelas. India dan Vietnam, eksportir beras pertama dan ketiga terbesar, termasuk negara

yang menutup ekspor mereka. Pedagang beras India menunda penandatanganan kontrak ekspor baru di tengah ketidakpastian karantina (Jadhav dan Bhardwaj, 2020). Sementara itu, Vietnam memberlakukan kuota ekspor untuk beras (ITC, 2020). Pembatasan-pembatasan ekspor tersebut, terutama jika diaplikasikan dalam bentuk pembatasan kuantitatif, dapat menciptakan ketidakstabilan baik di negara yang mengekspor maupun di pasar dunia (Martin dan Glauber, 2020).

Perubahan kebijakan yang dibuat oleh negara-negara pengekspor ini mengingatkan kembali akan krisis harga pangan pada tahun 2007-2008 ketika harga beras melonjak hingga hampir tiga kali lipat dari Oktober 2007 hingga April 2008. Selama krisis, kebijakan pembatasan ekspor India dan Vietnam memicu reaksi berantai di kalangan negara pengimpor seperti Filipina untuk melakukan pembelian karena panik, sehingga mengakibatkan harga naik tajam (Alavi et al., 2012: 38). Krisis harga pangan mendorong 130 juta orang di seluruh dunia dalam kemiskinan. Kondisi saat krisis tahun 2007-2008 dan pandemi saat ini berbeda, khususnya mengingat selama tahun 2019-2020 pasok pangan dan pertanian melimpah, sementara biaya input dan harga minyak mentah rendah (Schmidhuber dan Qiao, 2020). Meskipun demikian, langkah proteksionis secara tiba-tiba ini mengkhawatirkan, karena kejadian tidak terduga lainnya terhadap pasok dapat menyebabkan ketidakpastian di tengah pandemi. Perhitungan awal menunjukkan bahwa meningkatnya proteksionisme ekspor selama Covid-19 bisa meningkatkan harga pangan dunia hingga 18% secara rata-rata (Espitia et al., 2020). Di saat negara-negara telah mulai menyesuaikan dan terlibat dalam diplomasi untuk menangani pandemi, Vietnam melonggarkan larangan ekspornya menjadi kuota ekspor, dan kemudian menghapuskan hambatan tersebut pada Mei 2020, sementara pedagang India telah mulai menandatangani kontrak ekspor beras kembali.

Pada sisi impor, kebijakan pembatasan kebanyakan diberlakukan untuk mengurangi risiko kesehatan, terutama untuk produk pangan dan pertanian dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Di awal masa pandemi, risiko penularan virus corona (SARS-CoV-2) melalui produk pangan dan pertanian masih belum diketahui, dan banyak negara mengambil langkah preventif dengan melarang impor pangan dari RRT dengan alasan sanitasi dan *phytosanitary*. Akan tetapi, kondisi tersebut adalah kasus luar biasa yang berlangsung singkat. Mayoritas kebijakan impor dunia untuk pangan dan pertanian sejatinya adalah membebaskan, terutama dalam bentuk pengurangan tarif. Beberapa negara memberlakukan kebijakan pembebasan untuk memastikan akses ke bahan pangan, khususnya untuk komoditas yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Indonesia adalah salah satu negara tersebut, dan kita akan diskusikan dengan lebih rinci di bagian berikutnya.

Di tengah gangguan perdagangan yang berkepanjangan, harga pangan dunia masih cenderung stabil. Tekanan ke atas yang disebabkan oleh gangguan perdagangan diseimbangkan dengan tekanan ke bawah melalui pasok yang berlimpah dan, untuk beberapa komoditas bernilai tinggi, dengan pengurangan permintaan. Indeks Harga Pangan FAO menunjukkan bahwa harga pangan dunia relatif stabil selama lima tahun terakhir (Gambar 1). Baru-baru ini ada penurunan sedikit di awal pandemi antara Maret dan Mei, namun kemudian diikuti dengan kenaikan kembali. Indeks harga daging telah mengalami penurunan yang paling signifikan jika dibandingkan dengan indeks sereal, produk susu, dan gula, yaitu turun sebesar 9,4% pada September 2020 jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2019. Data komoditas Bank Dunia melaporkan bahwa harga beras meningkat hingga 14% antara Maret dan April 2020, kemudian

turun sedikit pada bulan Mei dan Juni, tetapi tetap di atas harga sebelum Covid-19 (Gambar 2). Kondisi tersebut kemungkinan besar disebabkan karena tingginya permintaan yang kemudian berangsur berkurang (FAO, 2020b: 26).

KETAHANAN PANGAN INDONESIA DI TENGAH COVID-19

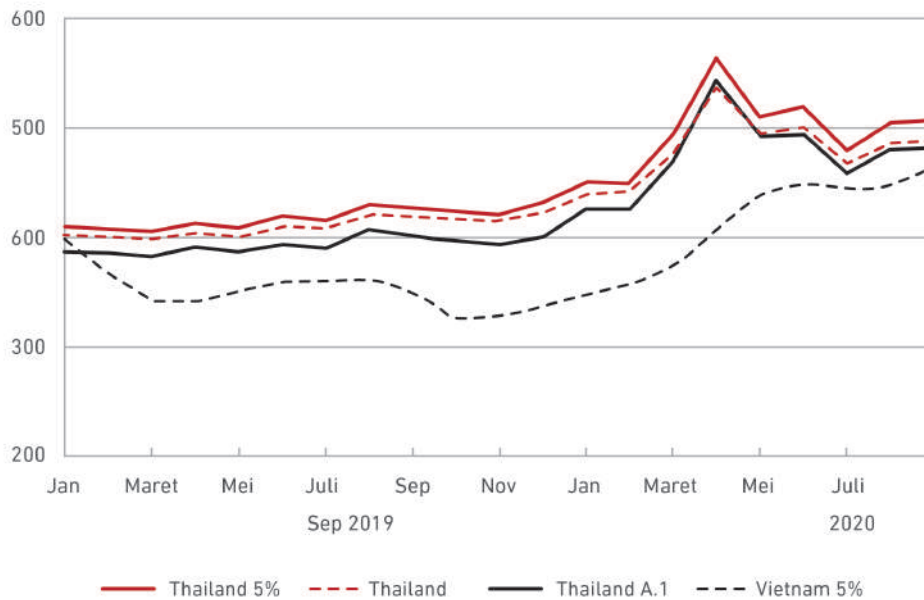
Sementara produksi beras global mengalami tren positif, tidak demikian halnya dengan produksi beras di Indonesia (Gambar 3). Setelah terus meningkat selama beberapa tahun, produksi beras Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar hampir 8% dari tahun 2018, penyebab utamanya adalah kekeringan ekstrem. Pada paruh pertama tahun 2020, produksi beras di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 16,8 juta ton, yaitu 9,7% lebih rendah daripada periode yang sama di tahun 2019, meneruskan tren yang terus menurun (Kementerian Pertanian, 2020). Walau pasok yang ada lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan domestik pada semester pertama dengan surplus 6,4 juta ton, ada kekhawatiran terhadap pasok beras pada akhir tahun dan awal tahun 2021 karena musim kemarau biasanya berkontribusi hanya sebesar 35% terhadap produksi tahunan (WFP, 2020).

Gambar 1.
Indeks Harga Pangan FAO, Januari 1990 hingga September 2020
(2014–2016 = 100)



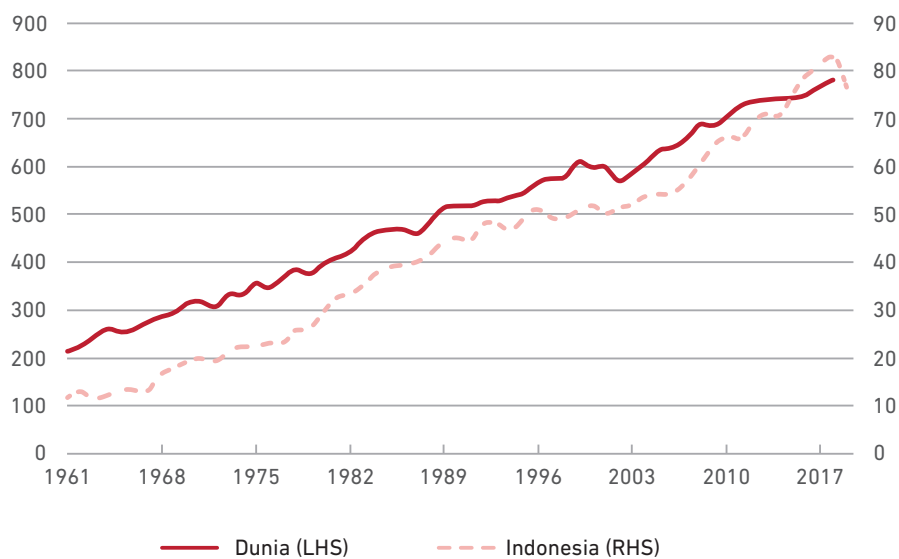
Sumber: FAO Food Price Index, www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en

Gambar 2.
Harga komoditas beras, Thailand dan Vietnam, Januari 2019 sampai September 2020
(US\$/ton)



Catatan: Thailand 5% butir patah, 25% butir patah dan A.1 (100% butir patah) harga beras putih, digiling, adalah harga survei indikatif, standar pemerintah, f.o.b. Bangkok. Harga beras putih Vietnam 5% butir patah, digiling, adalah harga survei indikatif, harga ekspor minimum, f.o.b. Hanoi.
 Sumber: Bank Dunia (2020c)

Gambar 3.
Produksi beras di Indonesia dan di dunia, 1961-2019
(digiling, juta ton)

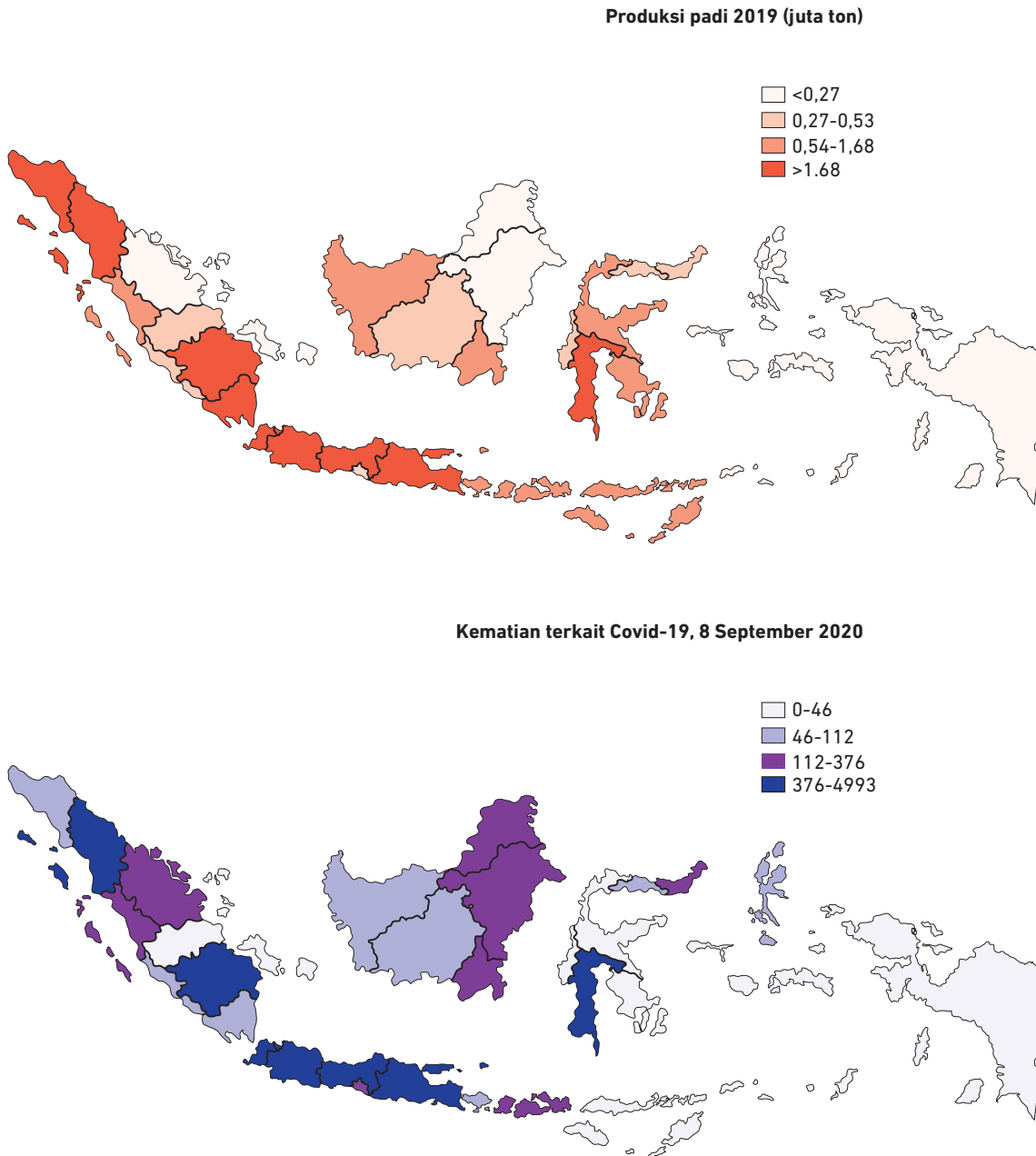


Catatan: Pada 2018, BPS menyesuaikan metode sampelnya (Ruslan 2019), berakibat pada perbedaan sebesar 40% pada estimasi produksi dibandingkan metode sampel yang digunakan sebelumnya. Kami menggunakan perbedaan ini untuk estimasi baru tahun 2018 dan 2019 guna membuat mereka layak untuk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
 Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik); FAO.

Kekhawatiran pasok beras bahkan lebih besar di wilayah Timur Indonesia. Produksi beras terkonsentrasi di bagian barat Indonesia, di mana pada 2019 pulau Jawa berkontribusi sebesar 56% dari total produksi beras domestik dan wilayah Sumatera berkontribusi sebesar 20% (BPS, 2020a). Menariknya, banyak dari wilayah produsen beras, misalnya beberapa provinsi di Jawa, menunjukkan tingkat kematian akibat Covid-19 yang relatif tinggi (Gambar 4). Kalau pandemi terus berlangsung, maka sangat memungkinkan bahwa produksi beras di Indonesia yang akan datang akan semakin terpuruk.

Warga di wilayah Indonesia Timur biasanya mengonsumsi bahan pangan pokok lain seperti sagu, jagung, dan singkong, namun konsumsi beras telah meningkat dan bahkan menggantikan pangan lokal sebagai bahan pangan pokok (Arifin et al., 2018). Akan tetapi, distribusi ke wilayah Indonesia Timur terganggu dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang secara resmi dimulai pada bulan April. Di bulan yang sama, Presiden Joko Widodo mengangkat isu kurangnya bahan pangan pokok di kebanyakan provinsi di Indonesia, yaitu bawang putih, gula, cabai, dan telur defisit di lebih dari 20 provinsi, serta beras defisit di tujuh provinsi (Rahman, 2020a). Meskipun peraturan PSBB lokal dilonggarkan pada bulan Juni, adanya protokol kesehatan, tantangan pengadaan dan berkurangnya kapasitas terus mengganggu distribusi.

Gambar 4.
Wilayah produsen beras dan Covid-19

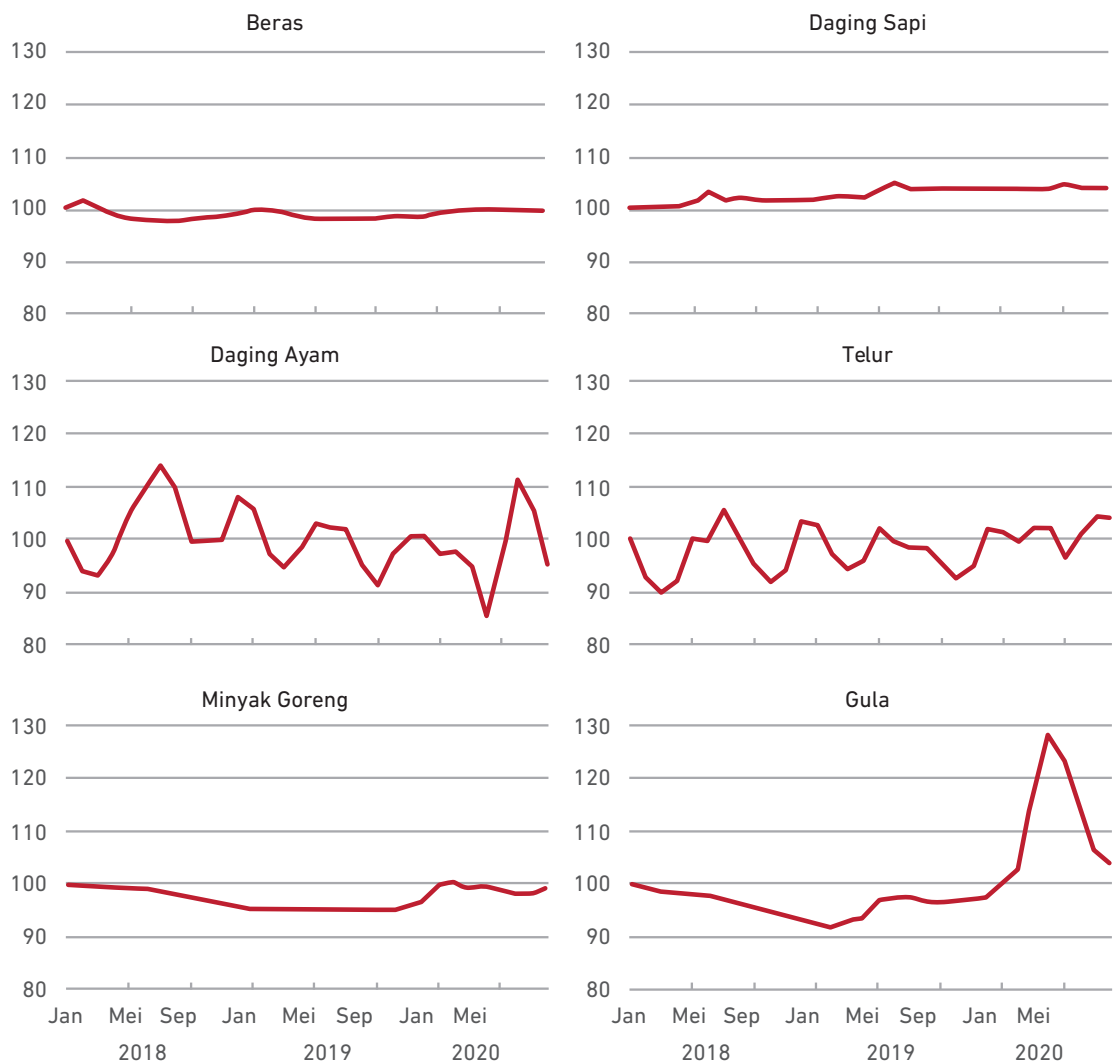


Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik); LaporanCOVID19.org

Menteri Pertanian menyatakan dalam pengarahannya pers virtual pada bulan Juli, bahwa hanya enam kapal yang mengirimkan pangan ke wilayah Indonesia Timur setiap bulannya, dibandingkan dengan 48 kapal per bulan sebelum pandemi. Selain itu, pengemudi truk yang mengirimkan ke wilayah dengan paparan Covid-19 yang tinggi juga harus dikarantina, sesuai dengan protokol perjalanan Covid-19, menambah keterlambatan lebih lanjut (Rahman, 2020b).

Bahkan sebelum pandemi, harga beberapa pangan utama sudah naik turun. Ketika Covid-19 mulai berdampak pada kegiatan ekonomi, harga terus meningkat. Akan tetapi, di dua kuartal terakhir, banyak jenis pangan yang menunjukkan penurunan harga (Gambar 5). Kondisi tersebut merefleksikan kecenderungan penurunan ekonomi secara umum, ketika syok permintaan

Gambar 5.
Harga pangan menjelang dan pada masa penyebaran pandemi, Januari 2018 hingga Agustus 2020 (Januari 2018 = 100)

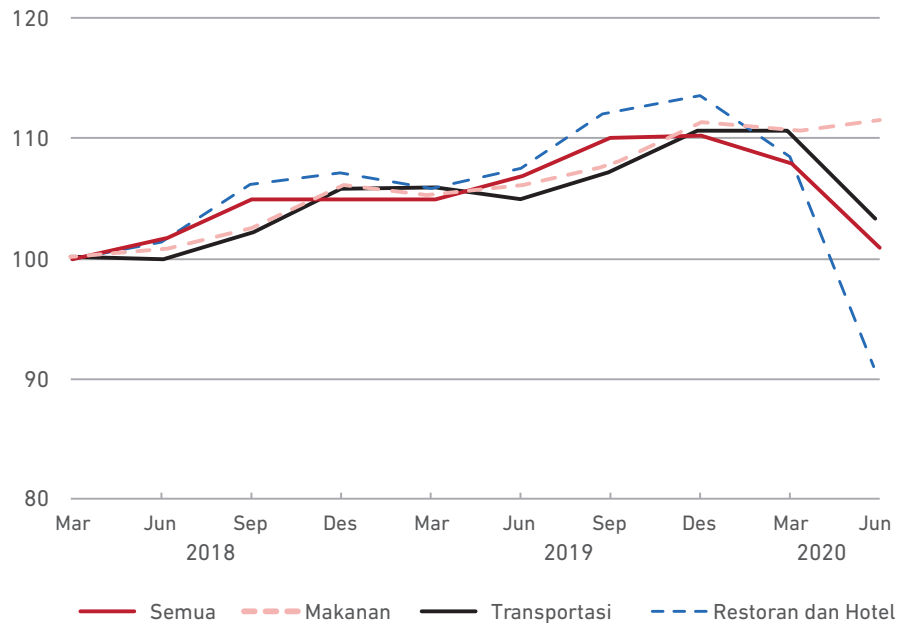


Sumber: PIHPS Nasional (2020).

(*demand shock*) muncul. Meskipun demikian, total pengeluaran konsumsi untuk pangan tidak turun dalam dua kuartal terakhir, tidak seperti kebutuhan lainnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6. Kondisi tersebut mengkonfirmasi bahwa elastisitas harga dan pendapatan untuk pangan lebih rendah dibandingkan dengan komoditas lainnya.

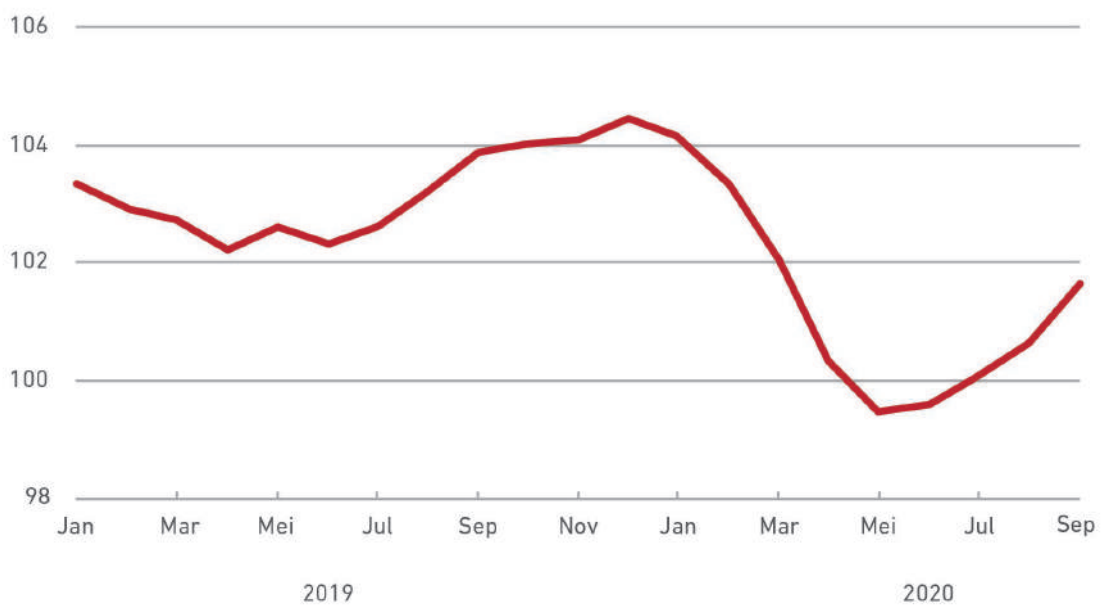
Peraturan PSBB juga telah mengganggu akses petani ke bahan baku dan ke pasar. Para petani melaporkan sulitnya mendapatkan tenaga kerja dan pupuk subsidi, serta adanya kenaikan harga input (IAIP-PRISMA, 2020). Di saat yang bersamaan, penutupan hotel, restoran, dan bisnis katering juga telah mengurangi permintaan pangan secara signifikan, sehingga membuat petani kehilangan pembeli dan menghadapi harga beli yang rendah. Akibatnya, nilai tukar petani Indonesia menurun dan bahkan berada di bawah 100 pada bulan Mei dan Juni, yang artinya harga yang mereka bayarkan untuk biaya produksi lebih tinggi daripada harga yang mereka terima (BPS, 2020b) (Gambar 7). Kondisi untuk petani sedikit membaik sejak bulan Juli, bersamaan dengan pelonggaran PSBB lokal dan dengan kembali dibukanya restoran dan mal, meskipun nilai tukar mereka masih tetap lebih rendah daripada nilai tukar pada tahun 2019. Petani-petani kecil sudah masuk dalam kategori prasejahtera, dengan tingkat kemiskinan 18%, yaitu dua kali lipat tingkat kemiskinan nasional (FAO, 2018b).

Gambar 6.
Pengeluaran konsumsi, Maret 2018 hingga Juni 2020
(Maret 2018 = 100)



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Gambar 7.
Nilai tukar petani, Januari 2019 sampai September 2020 (2018 = 100)



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Selain adanya gangguan pasok domestik, Indonesia juga terdampak oleh kekacauan perdagangan global, terutama untuk produk pertanian yang bergantung pada impor. Pada 2018, Indonesia mengimpor 94% pasok bawang putih, 69,9% gula, 28,4% daging, dan bahkan 6,2% beras dari luar negeri (WFP, 2020) (Tabel 1). Meskipun narasi swasembada digaungkan keras, Indonesia telah menjadi net importir beras dalam beberapa dekade terakhir, kecuali untuk tiga periode singkat ketika ekspor lebih besar daripada impor (Patunru, akan segera terbit). Ketika beberapa provinsi mengalami kelangkaan gula, bawang putih, daging, dan beras, kebutuhan untuk mempercepat impor mekanismenya dipersulit bukan hanya oleh gangguan perdagangan global, tetapi juga oleh kebijakan proteksionis Indonesia sendiri.

Hubungan antara perdagangan dan ketahanan pangan selalu diperbincangkan di Indonesia di mana ide swasembada selalu dominan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebelumnya mengatur bahwa impor pangan hanya diizinkan ketika pasok domestik tidak mencukupi. Untuk memastikan pelaksanaan UU tersebut, Indonesia memberlakukan hambatan-hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif guna membatasi impor pangan. Pada tahun 2018, rata-rata tarif impor sederhana yang diberlakukan bagi *most favoured nation* (MFN) untuk produk pertanian adalah 8,6% (WTO et al., 2019: 16). Sementara itu untuk hambatan non-tarif pada tahun 2019, 433 hambatan diberlakukan untuk produk pangan-pertanian, termasuk restriksi kuantitatif, hambatan sanitasi dan *phytosanitary*, serta hambatan teknis perdagangan (Tabel 2). Marks (2017) memperkirakan bahwa, pada 2015, hambatan non-tarif di sektor pertanian sendiri mencapai total tingkat perlindungan efektif sebesar 41%. Tahun ini, jumlah hambatan non-tarif yang diberlakukan telah meningkat lebih dari 7%, dan kemungkinan besar terkait dengan tingkat perlindungan yang lebih besar. Kontributor terbesar terhadap tingkat perlindungan efektif adalah pembatasan kuota, yang secara efektif membatasi jumlah impor.

Tabel 1.
Negara andalan impor Indonesia, 2018

Komoditas	Ketergantungan impor rasio (%) ^a	Sumber utama	Pembagian sumber utama total impor komoditas (%)
Beras	6,2	Thailand	35
Daging Sapi	28,4	Australia	49
Gula	69,9	Thailand	80
Kacang Kedelai	72,5	Amerika Serikat	98
Gandum	100,0	Australia	24
Bawang Putih	93,7	Republik Rakyat Tiongkok	100

^a : rasio ketergantungan impor adalah impor dibagi dengan jumlah produksi dan ekspor, dikurangi impor.
Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik).

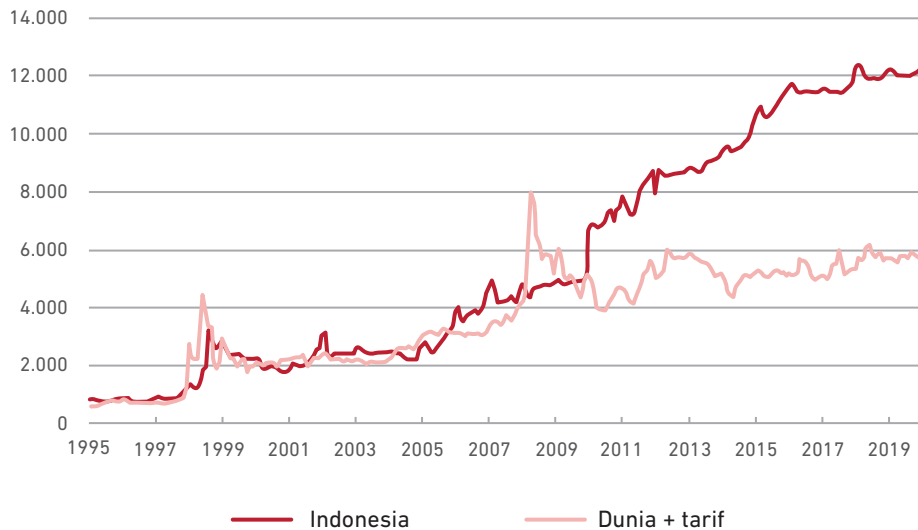
Tabel 2.
Hambatan non-tarif Indonesia untuk produk pangan-pertanian

Komoditas	2019	2020
Hambatan terkait ekspor	72	76
Upaya lainnya	7	7
Inspeksi pra pengiriman	23	23
Hambatan pengendalian harga	8	9
Hambatan pengendalian kuota	31	31
Tindakan Sanitasi dan Standar <i>Phytosanitary</i>	219	235
Hambatan Teknis Perdagangan	73	85
Total	433	466

Sumber: TRAINS: Pusat data hambatan non-tarif dunia, <https://trains.unctad.org>

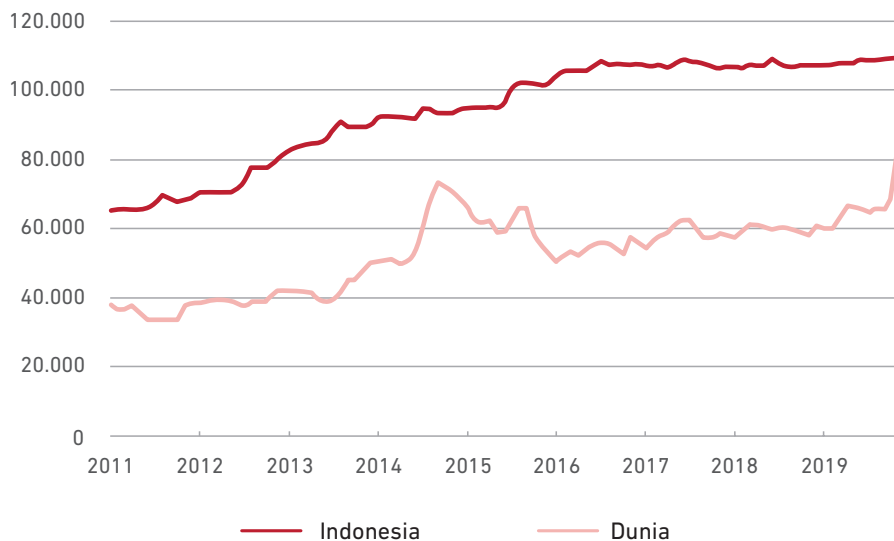
Dampak pembatasan perdagangan terhadap harga domestik bisa diilustrasikan dengan kasus beras dan daging sapi (Gambar 8 dan 9). Selama tahun 2019, harga rata-rata beras Indonesia sebesar Rp11.762,- per kilogram, dua kali lipat dari harga rata-rata internasional, yaitu Rp5.947,- per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata daging sapi adalah sekitar 60% lebih mahal daripada harga internasional (PIHPS Nasional, 2020; Bank Dunia, 2020c). Patunru (akan segera terbit) membahas hambatan-hambatan perdagangan yang cenderung akan menyebabkan jarak harga yang signifikan antara beras domestik dan impor. Dalam hal daging sapi, Respatiadi dan Nabila (2017) juga mengemukakan pembahasan yang serupa.

Gambar 8.
Harga beras domestik dan dunia, 1995 hingga Maret 2020 (rupiah/kg)



Catatan: Rangkaian harga domestik diwakilkan oleh harga grosir beras varietas IR-64 dan harga dunia diwakili oleh harga grosir beras varietas Thai 25% digiling. Harga dunia dikonversikan menjadi rupiah, ditambahkan US\$20/ton untuk biaya pengiriman dan penanganan, US\$5/ton untuk keuntungan impor dan keuntungan berjalan, tarif khusus (Rp430/kg dari Januari hingga Desember 2006, Rp550/kg dari Januari hingga November 2007 dan Rp450/kg dari Desember 2007 hingga seterusnya).
 Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik); Bank of Thailand.

Gambar 9.
Harga daging sapi domestik dan dunia, 2011-2019 (rupiah/kg)



Catatan: Harga Indonesia adalah harga daging sapi eceran; harga internasional adalah daging sapi (Australia, Selandia Baru), bagian iga (*chuck*) dan *forequarter*, tanpa tulang dan beku, 85 *chemical lean*, c.i.f pelabuhan AS (Pantai Timur), ex-dock.
 Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik); Bank Dunia.

Selain itu, pembatasan perdagangan seringkali menyebabkan keterlambatan impor yang mengakibatkan kenaikan harga, seperti dalam kasus bawang putih dan bawang bombai (KPPU, 2020). Bawang putih dan bawang bombai dibatasi melalui kuota yang membutuhkan surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan izin impor dari Kementerian Perdagangan (Tabel 3). Sistem ini sebelumnya telah berujung pada kasus korupsi di mana pembuat kebijakan didakwa menerima suap sebagai ganti dari sebuah izin impor (Adjie, 2020). Pada tahun 2020, rumitnya proses impor berakhir pada keterlambatan, menyebabkan harga bawang putih naik hingga 49% menjadi Rp57.350,- per kilogram dan di beberapa minggu bahkan naik lebih dari Rp70.000 per kilogram antara Desember dan Maret (KPPU, 2020). Dihadapkan dengan gangguan perdagangan global selama pandemi, pembatasan impor hanya membatasi kemampuan Indonesia untuk secara proaktif mengantisipasi atau meringankan kelangkaan pangan. Sebagai respons, Kementerian Perdagangan mengeliminasi persyaratan perizinan impor untuk bawang putih dan bawang bombai secara temporer pada bulan Maret. Akhirnya, harga bawang putih turun kembali ke Rp40.650,- per kilogram per 23 April 2020 (PIHPS Nasional, 2020). Strategi pembebasan impor tersebut sedikit berbeda dari kebijakan swasembada di Indonesia biasanya. Meskipun demikian, hal tersebut hanya berlangsung singkat. Hambatan pembebasan perdagangan hanya bersifat sementara hingga 31 Mei 2020 dan tidak diperpanjang lagi ketika harga sudah stabil.

Tabel 3.
Regulasi impor pangan: bawang putih dan bawang bombai

Regulasi	Persyaratan
Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	Importir harus menerima Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian. Untuk bawang putih, importir harus berkomitmen menghasilkan 5% dari total volume impor di Indonesia dan menyampaikan laporan dari upaya panen sebelumnya, jika ada. (Pasal 18.2) RIPH diterbitkan dua kali per tahun. Importir bisa menggunakan RIPH hanya di waktu-waktu tertentu di luar masa prapanen, panen dan pascapanen, seperti yang diputuskan oleh Direktorat Jenderal. (Pasal 6 dan 10)
Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 24 Tahun 2018 amendemen Permentan Nomor 38 tahun 2017	Batas waktu pengeluaran RIPH dalam Pasal 6 dan 10 dihapuskan. Importir sekarang bisa mengajukan RIPH kapan saja. Persyaratan yang ditetapkan tetap sama dengan Peraturan Nomor 38/2017.
Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura	Importir harus mendapatkan izin impor dari Menteri Perdagangan. Persyaratan dokumennya adalah (Pasal 6): <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Bukti kepemilikan penyimpanan dingin 3. Bukti kepemilikan transportasi yang sesuai untuk produk hortikultura 4. Surat pernyataan kondisi penyimpanan dingin dan transportasi 5. RIPH Importir juga harus melakukan inspeksi pra pengiriman di negara pengekspor, dilakukan melalui Laporan Surveyor. (Pasal 17–19)
Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 amendemen Permendag Nomor 44 tahun 2019	Pengecualian sementara untuk persyaratan izin impor dan Laporan Surveyor untuk bawang bombai dan bawang putih yang dikirimkan sebelum tanggal 31 Mei 2020.

Respons Indonesia yang lebih luas terhadap potensi krisis pangan selama pandemi tetap konsisten dengan ide swasembada. Sebagai respons terhadap kekhawatiran pasok pangan pada tahun 2020 atau 2021, pemerintah mengacu ke upaya domestik, yaitu dengan meningkatkan produksi domestik alih-alih melihat peluang perdagangan. Presiden Joko Widodo mengumumkan pembuatan *food estate* di Kalimantan dengan target untuk mengembangkan area seluas 165.000 hektar menjadi kawasan pertanian, dan setelahnya menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengawasi pengembangannya (Fachriansyah, 2020; Parama, 2020). *Food estate* berskala besar sejak lama telah menjadi pilihan pemerintah Indonesia, dimulai dengan program Mega Rice Presiden Suharto, program Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke Presiden

Yudhoyono, dan program *food estate* seluas 500.000 hektar Presiden Widodo di Kalimantan tahun 2015, meskipun model ini sudah berulang kali dikritik karena gagal mencapai target produksi yang diinginkan, menyebabkan masalah lingkungan serius, mengacuhkan hak penduduk lokal, dan bahkan berkontribusi terhadap kemiskinan penduduk lokal (Neilson, 2018 : 82–83).

Untuk membantu mengurangi kerawanan pangan bagi masyarakat prasejahtera yang rentan selama pandemi Covid-19, Kementerian Sosial Indonesia memperluas Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari 15 juta keluarga menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat. Subsidi juga dinaikkan dari Rp150.000,- menjadi Rp200.000,- per keluarga per bulan, dan bisa digunakan untuk membeli beras, telur, sayuran, buah, dan kacang-kacangan (SKRI, 2020). Program ini merupakan sebuah bantuan yang diperlukan, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa bantuan ini kehilangan efektivitasnya ketika harga pangan tetap mahal (Ilman, 2020).

IMPLIKASI JANGKA PANJANG

Dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan sangat nyata, terutama dalam hal akses dan diversifikasi pola pangan. Masyarakat di luar Jawa lebih rentan terhadap kelangkaan pangan jika masalah distribusi tidak diatasi. Sementara masyarakat di daerah pedesaan bisa beradaptasi dengan sumber makanan lokal untuk penghidupan mereka, opsi ini sulit untuk masyarakat yang tinggal di area non-pertanian atau masyarakat prasejahtera di daerah perkotaan. Kurangnya akses fisik dan finansial untuk pangan bisa menyebabkan jutaan orang menderita kelaparan. Dampak ini sudah mulai muncul. Survey berfrekuensi tinggi yang dilakukan oleh Bank Dunia mencakup lebih dari 4.000 responden menemukan bahwa, di dua minggu pertama Mei 2020, 31% rumah tangga mengalami kekurangan pangan dan 38% rumah tangga mengonsumsi pangan lebih sedikit dari yang seharusnya (Bank Dunia, 2020d). Ada sedikit perbaikan yang diamati pada Agustus 2020 setelah PSBB dilonggarkan, namun angkanya tetap mengkhawatirkan, yaitu pada 24% dan 30% (Purnamasari dan Sjahrir, 2020). Keluarga yang terdampak paling banyak merupakan keluarga prasejahtera, dikepalai oleh perempuan dan berlokasi di luar Jawa, dan cenderung mengalami syok pendapatan yang menunjukkan masalah kemampuan finansial untuk membeli pangan.

Kualitas diet cenderung akan memburuk. Masyarakat yang kehilangan pendapatan akan mengalihkan konsumsi mereka ke makanan yang lebih murah dan kurang bergizi seperti beras, seperti yang terjadi saat krisis ekonomi Asia, hingga mengakibatkan prevalensi anemia di kalangan anak-anak (Block et al., 2004; Headey dan Ruel, 2020). Hal tersebut akan memperburuk diet yang sudah tidak baik, di mana beras mencapai 70% dari kebutuhan energi harian masyarakat Indonesia, sementara konsumsi buah, sayuran, dan daging masih rendah. Jika kualitas makanan yang dikonsumsi ini tidak diatasi, peningkatan kasus kekerdilan juga diperkirakan bisa terjadi sebab ada korelasi tinggi antara mahalnya diet yang sehat dan kekerdilan anak (FAO et al., 2020: 86, 113).

Implikasi kebijakan pangan Indonesia lebih dari sekadar masalah ketahanan pangan; ini juga berdampak pada kemiskinan. Hubungan antara pangan dan kemiskinan ini bermata dua. Kemiskinan mencegah masyarakat mengakses makanan berkualitas dan, pada saat yang sama, harga pangan yang tinggi mencegah masyarakat keluar dari kemiskinan. Rata-rata, orang Indonesia mengeluarkan hampir setengah dari pendapatan mereka untuk makanan dan minuman.⁴ Perhitungan awal menunjukkan bahwa pandemi bisa meningkatkan angka kemiskinan dari 9,2% pada 2019 menjadi 9,7% untuk skenario paling ringan, atau menjadi 16,7% dalam skenario terburuk pada akhir 2020, yang artinya ada tambahan antara 1,3 juta dan 19,7 juta warga Indonesia yang masuk kategori prasejahtera, menghapus perkembangan upaya pengurangan kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir (Suryahadi et al., 2020). Harga pangan yang tinggi akan menghambat upaya pengurangan kemiskinan setelah Covid-19.

⁴World Bank Global Consumption Database—Indonesia, <http://datatopics.worldbank.org/consumption/country/Indonesia>

LANGKAH KE DEPAN: MEMBANGUN SISTEM PANGAN YANG KUAT

Pandemi Covid-19 memaparkan kerentanan sistem pangan Indonesia, terutama dalam hal turunnya tren produksi, kapasitas distribusi yang tidak mencukupi, serta pembatasan perdagangan. Indonesia saat ini menghadapi risiko masalah pangan di tengah pandemi dengan potensi implikasi jangka panjang terhadap kemiskinan dan gizi. Sementara itu, krisis iklim sudah memberikan tekanan terhadap sistem pangan Indonesia yang dapat memperburuk masalah pangan secara jangka panjang. Reformasi kebijakan di sektor pangan dan pertanian akan menjadi sangat penting untuk memastikan sistem pangan yang lebih kuat dan sehat.

Tambahan penanaman modal akan diperlukan untuk memperkuat produksi pertanian domestik Indonesia, terutama untuk penelitian dan pengembangan, serta teknologi untuk pertanian yang berkelanjutan. Investasi di sektor pertanian Indonesia pada tahun 2016 tidak cukup, yaitu senilai Rp400 triliun, kebanyakan datang dari para petani sendiri dan kurang dari 5% dari penanaman modal asing (ADB, 2019). *United Nations Conference on Trade and Development* memperkirakan bahwa penanaman modal asing akan menurun hingga 40% pada tahun 2020 dan penanaman modal asing di Asia bisa menurun hingga sekitar 30–45% (UNCTAD, 2020b). Menghadapi perkiraan yang pesimis ini, pemerintah Indonesia harus secara proaktif menarik penanaman modal asing untuk mendukung pertanian Indonesia dengan menyederhanakan kerangka kerja regulasi yang ada (Patunru dan Surianta, 2020).

Selain mendukung produksi pertanian domestik, diversifikasi pasok pangan juga diperlukan. Mengandalkan produksi domestik saja bisa meningkatkan paparan risiko produksi domestik. Meskipun demikian, pembatasan perdagangan seperti restriksi kuantitatif (pembatasan kuota) telah mengganggu kemampuan Indonesia untuk membeli bahan pangan dari pasar global saat krisis. Terlebih lagi, pembatasan perdagangan telah membuat harga pangan domestik selalu tinggi jika dibandingkan dengan harga internasional, yang mencegah kalangan prasejahtera untuk mengakses pangan dan juga mengganggu upaya pengurangan angka kemiskinan. Indonesia bisa diuntungkan dengan mengurangi pembatasan impor pangan dan pertaniannya, misalnya dengan menyederhanakan hambatan non-tarif antar kementerian dan lembaga pemerintah, serta mereformasi metode pemberian izin impor di Kementerian Perdagangan.

Perubahan untuk membuka investasi dan perdagangan pangan bisa diwujudkan melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan pada Oktober 2020. UU tersebut mengubah provisi UU Pangan yang sekarang mengizinkan impor, dengan mempertimbangkan kepentingan petani dan nelayan. UU ini juga menghapus pembatasan dan halangan penanaman modal asing di sektor hortikultura, perkebunan, dan hewan ternak, serta melonggarkan pembatasan bahan baku seperti benih dan obat hewan. Hal itu merupakan terobosan besar di sektor yang sangat dibatasi dan berpotensi mendorong ketahanan pangan Indonesia dengan membuka akses ke pasar global. Akan tetapi, banyak perubahan dalam Omnibus Law yang harus diklarifikasi dalam peraturan pemerintah turunannya, sehingga perubahan kebijakan dan prosedurnya, serta pelaksanaannya akan masih bisa diantisipasi.

Selain dari mereformasi kebijakan domestik, Indonesia juga bisa bekerja sama dengan negara lain untuk memastikan ketahanan pangan regional. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), misalnya, memiliki fokus utama di sektor pertanian. Sebagai respons terhadap krisis harga pangan tahun 2008, MEA membentuk *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR), yang bisa sangat berguna di saat krisis. Akan tetapi, inisiatif ini memerlukan perbaikan yang signifikan. Di luar itu, MEA melalui Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN menyediakan peluang untuk integrasi yang lebih besar ke pasar (Patunru dan Ilman, 2020). Greenville (2018) memperkirakan bahwa integrasi pasar beras di ASEAN bisa mengurangi jumlah rumah tangga yang kekurangan nutrisi hingga 5%, dengan membawa manfaat ketahanan pangan bagi Indonesia.

Untuk menyimpulkan, kebijakan pangan swasembada tidak berguna, terutama saat krisis, dan bisa berisiko memperburuk risiko kerawanan pangan. Selama dan setelah krisis, kerja sama regional atau global untuk mengelola aliran perdagangan pangan merupakan hal yang penting untuk ketahanan pangan. Indonesia bisa mendukung hal ini dengan menelaah kembali dan mereformasi kebijakan dalam negerinya sendiri untuk menjadi lebih terbuka terhadap perdagangan pangan global.

REFERENSI

ADB, lihat Asian Development Bank

Asian Development Bank. (2019, Oktober). *Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development during 2020–2045*. Manila: Asian Development Bank.

Adjie, Moch. Fiqih Prawira. (2020, 7 Mei). Former PDI-P lawmaker sentenced to seven years in prison in garlic import permit bribery case. *Jakarta Post*. Diakses dari www.thejakartapost.com/news/2020/05/07/former-pdi-p-lawmaker-sentenced-to-seven-years-in-prison-in-garlic-import-permit-bribery-case.html

AIP-PRISMA, lihat Australia–Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture

Australia–Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture. (2020, 29 April). Impact of COVID-19 on agriculture (farmers perspective). Diakses dari [https://aip-prisma.or.id/data/public/uploaded_file/2020-05-29_09-44-01am_PRISMA_Report_COVID-19_Study__Farmers_Perspective_\(English\).pdf](https://aip-prisma.or.id/data/public/uploaded_file/2020-05-29_09-44-01am_PRISMA_Report_COVID-19_Study__Farmers_Perspective_(English).pdf)

Alavi, Hamid R., Aira Htenas, Ron Kopicki, Andrew W. Shepherd dan Ramon Clarete. (2012). *Trusting Trade and the Private Sector for Food Security in Southeast Asia*. Washington DC: Bank Dunia.

Arifin, Bustanul, Noer Azam Achsani, Drajat Martianto, Linda Karlina Sari dan Ahmad Heri Firdaus. (2018). *Modeling the future of Indonesian food consumption: Final report*. Jakarta: World Food Programme. Diakses dari www.wfp.org/content/2018-modeling-future-indonesia-food-consumption

Bank Dunia. (2020a). *Global Economic Prospects, June 2020*. Washington DC: Bank Dunia. Diakses dari www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects

Bank Dunia. (2020b). Agricultural Raw Materials Exports (% of Merchandise Exports). Diakses dari <https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.AGRI.ZS.UN>

Bank Dunia. (2020c). Commodity Markets Monthly Prices. Diakses dari www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

Bank Dunia. (2020d). High-frequency monitoring of households: Summary of results from survey round 1, 1–17 Mei 2020. *Bank Dunia*. Diakses dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34740>

Block, Steven A., Lynnda Kiess, Patrick Webb, Soewarta Kosen, Regina Moench- Pfanner, Martin W. Bloem dan C. Peter Timmer. (2004). Macro shocks and micro outcomes: Child nutrition during Indonesia's crisis. *Economics & Human Biology* 2(1): 21–44. doi.org/10.1016/j.ehb.2003.12.007

Bloomberg. (2020, 25 Maret). Indian ports in confusion as virus lockdown hits operations. *Bloomberg*. Diakses dari www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-25/indian-ports-declare-force-majeure-amid-national-virus-lockdown

BPS, lihat Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. (2020a). Luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut provinsi 2018–2020. Diakses dari www.bps.go.id/indicator/53/1498/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html

Badan Pusat Statistik. (2020b). NTP (Nilai Tukar Petani) menurut provinsi (2018 = 100) 2020. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/22/1741/1/ntp-nilai-tukar-petani-menurut-provinsi-2018-100-.html>

Databoks. (2017). Di mana provinsi dengan stunting tertinggi 2017? *Databoks*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/08/di-mana-provinsi-dengan-stunting-tertinggi-2017>

Espitia, Alvaro, Nadia Rocha dan Michele Ruta. (2020). COVID-19 and food protectionism: The impact of the pandemic and export restrictions on world food markets. *Policy Research Working Paper* No. 9253. Washington DC: Bank Dunia. Diakses dari <http://hdl.handle.net/10986/33800>

Fachriansyah, Rizki. (2020). Prabowo to Oversee Development of Food Estate Program, Jokowi Says. *Jakarta Post*. Diakses dari www.thejakartapost.com/news/2020/07/14/prabowo-to-oversee-development-of-food-estate-program-jokowi-says.html

FAO, lihat Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018a). *The State of Agricultural Commodity Markets 2018: Agricultural Trade, Climate Change and Food Security*. Rome: FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018b). Small Family Farms Country Factsheet: Indonesia. Diakses dari www.fao.org/3/i8881en/i8881EN.pdf

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020a). FAO cereal supply and demand brief. Diakses dari www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020b). Crop prospects and food situation. *Quarterly Global Report* No. 2, Juli. Diakses dari www.fao.org/3/ca9803en/CA9803EN.pdf

Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agriculture Development, United Nations International Children's Fund, World Food Programme dan World Health Organization (FAO, IFAD, UNICEF, WFP dan WHO). (2020). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2020: Transforming Food Systems for Affordable Healthy Diets*. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/ca9692en>

Greenville, Jared. (2018). ASEAN rice market integration: Findings from a feasibility study. Dalam *OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers* No. 117. Paris: OECD Publishing. doi.org/10.1787/8ca16e31-en

Headey, Derek and Marie Ruel. (2020). The COVID-19 nutrition crisis: What to expect and how to protect. Dalam Johan Swinnen and John McDermott (Ed.), *COVID-19 and Global Food Security* (pp. 38–41). International Food Policy Research Institute.

Ilman, Assyifa Szami. (2020). Dampak Tingginya Harga Pangan terhadap Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Indonesia: Studi Kasus di Nusa Tenggara Timur. *Makalah Kebijakan CIPS* No. 26. www.cips-indonesia.org/bpnt-case-study-in-ntt

ITC (International Trade Centre). (2020, 6 Oktober). COVID-19 temporary trade measures. www.macmap.org/covid19

Jadhav, Rajendra dan Mayank Bhardwaj. (2020, 4 April). Exclusive: Indian Rice Exports Suspended on Supply Chain Disruption– Industry. *Reuters*. Diakses dari www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-india-food-exclusi-idUSKBN21L1XX

Kementerian Pertanian. (2020). Kementan: Tidak benar stok beras menipis. Diakses dari <http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/kementan-tidak-benar-stok-beras-menipis>

KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha). (2020). *Perkembangan komoditi bawang putih di awal 2020* [Siaran Pers No. 7/KPPU/PR/II/2020].

Marks, Stephen V. (2017). Non-tariff trade regulations in Indonesia: Nominal and effective rates of protection.

Martin, Will J. and Joseph W. Glauber. (2020). Trade policy and food security. Dalam Richard E. Baldwin and Simon J. Evenett (Ed.), *COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won't Work*, (pp. 89–101). London: CEPR Press.

MLA (Meat & Livestock Australia). (2020). Industry projections 2020: Australian cattle – April update. Diakses dari www.mla.com.au/prices-markets/Trends-analysis/cattle-projections/

Neilson, Jeff. (2018). Feeding the bangsa: Food sovereignty and the state in Indonesia. Dalam Arianto A. Patunru,

Mari Pangestu and M. Chatib Basri (Ed.), *Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty* (pp. 73–89). Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute.

Oxford Economics. (2020). Mapping Asia's Food Trade and the Impact of COVID-19. Singapore: Oxford Economics.

Parama, Mardika. (2020, 11 Juni). Government to Develop 165,000 Hectares Land in Central Kalimantan for Food-Estate Program. *Jakarta Post*. Diakses dari www.thejakartapost.com/news/2020/06/11/government-to-develop-165000-hectares-land-in-central-kalimantan-for-food-estate-program.html

Patunru, Arianto A. (Akan segera terbit). Is Greater Openness to Trade Good? What are the Effects on Poverty and Inequality? Dalam Richard Barichello, Arianto A. Patunru and Richard Schwindt (Ed.), *Globalization, Poverty, and Income Inequality: Insights from Indonesia*. Vancouver: University of British Columbia Press.

Patunru, Arianto A. dan Assyifa Szami Ilman. (2020). Ekonomi Politik Kebijakan Beras di Indonesia: Sebuah Perspektif Terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Makalah Diskusi CIPS* No. 6. www.cips-indonesia.org/politiceconomy-rice-policy

Patunru, Arianto A. dan Andree Surianta. (2020). Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Pasca COVID-19 dengan Menyederhanakan Kerangka Kerja Regulasi Indonesia. *Ringkasan Kebijakan CIPS*. Diakses dari: www.cips-indonesia.org/post/policy-brief-attracting-fdi-post-covid-19-by-simplifying-indonesia-s-regulatory-framework

PIHPS Nasional, lihat Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. (2020). Diakses dari <https://hargapangan.id>

Purnamasari, Ririn and Bambang Suharnoko Sjahrir. (2020). *High-frequency monitoring of socio-economic impact of COVID-19 on households in Indonesia* [Video]. World Bank presentation, ANU Indonesia Project Global Seminar Series. Diakses dari www.youtube.com/watch?v=4DYck8WOLxk

Rahman, Dzulfiqar Fathur. (2020a, 8 Mei). Virus, Climate Change Cause Food Shortages in Parts of Indonesia. *Jakarta Post*. Diakses dari www.thejakartapost.com/news/2020/05/06/virus-climate-change-cause-food-shortages-in-parts-ofindonesia.html

Rahman, Dzulfiqar Fathur. (2020b, 15 Juli). Pandemic Disrupts Food Distribution Across country, Minister Says. *Jakarta Post*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/14/pandemic-disrupts-food-distribution-across-country-minister-says.html>

Respatiadi, Hizkia dan Hana Nabila. (2017). *Beefing up the stock: Reformasi Kebijakan untuk Menurunkan Harga Daging Sapi di Indonesia*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies. <https://repository.cips-indonesia.org/publications/271870/beefing-up-the-stock-policy-reform-to-lower-beef-prices-in-indonesia>

Ruslan, Kadir. (2019). Memperbaiki Data Pangan Indonesia Lewat Metode Kerangka Sampel Area. *Makalah Diskusi CIPS* No. 7. Diakses dari www.cips-indonesia.org/area-sampling-frame-method

Schmidhuber, Josef. (2020). COVID-19: From a global health crisis to a global food crisis? *Food and Agriculture Organization Food Outlook Edisi Juni 2020*. Diakses dari www.fao.org/3/ca9509en/covid.pdf

Schmidhuber, Josef dan Bing Qiao. (2020). Comparing Crises: Great Lockdown versus Great Recession. Rome: FAO. Diakses dari <https://doi.org/10.4060/ca8833en>

Schmidhuber, Josef, Jonathan Pound dan Bing Qiao. (2020). COVID-19: *Channels of Transmission to Food and Agriculture*. Rome: Food and Agriculture Organization. Diakses dari <https://doi.org/10.4060/ca8430en>

SKRI (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia). (2020, 9 Mei). Atasi Dampak COVID-19, Kemensos Berikan Bansos Reguler dan Nonreguler. Diakses dari <https://setkab.go.id/atasi-dampak-covid-19-kemensos-berikan-bansos-reguler-dan-nonreguler/>

Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati dan Daniel Suryadarma. (2020). Estimating the impact of COVID-19 on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56(2): 175–92. Diakses dari doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390

UNCTAD, lihat United Nations Conference on Trade and Development

United Nations Conference on Trade and Development. (2020a). *Global Trade Continues Nosedive, UNCTAD Forecasts 20% Drop in 2020*. Diakses dari <https://unctad.org/news/global-trade-continues-nosedive-unctad-forecasts-20-drop-2020>

United Nations Conference on Trade and Development. (2020b). *World Investment Report 2020: International Production beyond the Pandemic*. New York: United Nations Publications. Diakses dari https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf

WFP, lihat World Food Programme

World Food Programme. (2017). Food security monitoring bulletin–Indonesia Special focus: Food affordability and Ramadan. Jakarta: World Food Programme. Diakses dari https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp291748.pdf?_ga=2.181577763.564713101.1604921287-289071716.1602485830

World Food Programme. (2020). Indonesia. COVID-19: Economic and Food Security Implications. Diakses dari www.wfp.org/publications/indonesia-covid-19-economic-and-food-security-implications

WITS, lihat World Integrated Trade Solution

World Integrated Trade Solution. (2020). Indonesia Product Exports and Imports 2018. Diakses dari <https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/IDN/textview>

WTO, lihat World Trade Organization

World Trade Organization. (2020, 8 April). *Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy* [Siaran Pers]. Diakses dari www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

World Trade Organization, International Trade Centre dan United Nations Conference on Trade and Development (WTO, ITC dan UNCTAD). (2019). *World Tariff Profile 2019*. Geneva: World Trade Organization. Diakses dari https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_tariff_profiles19_e.htm

TENTANG PENULIS

Arianto Patunru adalah Anggota Dewan Direksi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dan fellow di Arndt-Corden Department of Economics, Crawford School of Public Policy, Australian National University. Ia pernah menjadi Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE-UI).

Felippa Amanta adalah Peneliti di CIPS yang meneliti seputar ketahanan pangan dan perdagangan bebas. Ia memperoleh Sarjana Sosiologi dari University of California, Berkeley, dan Master Administrasi Publik dari Australian National University. Sebelumnya, Felippa bekerja sebagai *Program Associate* di Institute for Research on Labor and Employment, UC Berkeley, dan di Women and Youth Development Institute of Indonesia di Surabaya.

AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI

Melalui *Supporters Circles*, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam *Supporters Circles*, *supporters* akan mendapatkan keuntungan dengan terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. *Supporters* bisa mendapatkan:

- Undangan Tahunan *Gala Dinner* CIPS
- Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
- Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
- Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
- Mendapatkan *hard-copy* materi publikasi CIPS (lewat permintaan)



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi anthea.haryoko@cips-indonesia.org.



Pindai untuk bergabung



TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

FOKUS AREA CIPS:


Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.

Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.


Kesejahteraan Masyarakat: CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikut dengan pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan kesejahteraan komunitas dengan baik.


www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.linkedin.com/company/center-for-indonesian-policy-studies)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia